

REFERENCES

- Ariyati, Rina., Margani Pinasti, dan Negini Koncono Putri. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2017). Penyusunan Laporan keuangan Berbasis Akrua. Diakses pada 20 Januari 2019, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-ap/23718-penyusunan-laporan-keuangan-berbasis-akrua>.
- Beatric V. 2014. Analysing Difference of Accounting Policies Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Before and After Status Badan Layanan Umum (BLU). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 2, No. 1, July 2014, 55-62 p-ISSN: 2337-7887*.
- Broadbent, J. & Guthrie, J. 1992. Changes in the Public Sector: A Review of Recent Alternative Accounting Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*,(5)2: 3-31.
- Christensen, M. 2002. Accrual Accounting in the Public Sector: The Case of the New South Wales Government. *Accounting History*, 7(2), 93-124.
- Godfrey, A. D., et al. (2001). A Diffusion-Contingency Model for Government Accounting Innovations International Comparative Issues in Government Accounting (pp. 279-296): Springer.
- Herwiyanti, Eliada., Sukirman. dan Fairuz Sufi Aziz. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 19 (1). Diakses dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id>
- Husain. Nirmawati.,Grace B. Nangoi, dan Hendrik Manossoh. (2017). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tani Dan Nelayan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 8 (2). Diakses dari <http://www.neliti.com>
- Innes, J., dan Mitchell, F. 1990. The Process of Change in Management Accounting: Some Field Study Evidence. *Management Accounting Research*, 1(1), 3-19.

- Jahra, Nurul. 2013. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Daerah Kaliset-Jember. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Jaruga, A., dan Nowak, W. A. 1996. Toward A General Model of Public Sector Accounting Innovations. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 21-32.
- Jumingan. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.2., dalam Antari G.A.Y. 2016. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BANGLI. Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016*
- Kawenas, Riani Isye., Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 9 (1). Diakses dari <http://www.ejournal.unsrat.ac.id>
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/372/2008 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Luder, K. 1992. A Contingency Model of Governmental Accounting Innovations in the Political Administrative Environment. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 7, 99-127.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Malika N. 2018. Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Artikel Penelitian*.
- Meidyawati. 2010. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. URL: <http://www.infodiknas.com/wpcontent/uploads/2018/11/analisisimplementasipolapengelolaankeuangan-badanlayanan-umum-ppkblu-pada-rumah-sakit-stroke-nasionalbukittinggi.pdf>, dalam Malika N. 2018. Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Artikel Penelitian*.

- Merrouche, C., et al. 1996. Local Government Accounting in Algeria and Morocco. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 9, 139-156.
- Moerniati, Sri. 2013. *Pengungkapan Laporan Keuangan Infrastruktur Kabupaten Banyumas dalam Mendukung Keberhasilan Pencapaian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches (seventh edition)*. England : Pearson Education Limited.
- Noegroho. R.S., Palupi A. 2015. Peran Para Aktor dalam Implementasi Akuntansi Akrual Sektor Pemerintahan di Indonesia (2000 - 2014). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXV, No. 2 Agustus 2015*.
- Oliorilanto, R. H. 2008. Contingency Factors Affecting the Adoption of Accrual Accounting in Malagasy Municipalities. *International Journal on Governmental Financial Management*, 8(1), 37-50.
- Otley, D. T. 1980. The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413-428.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Prastowo, Dwi, Rifka Juliaty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKNP, dalam Antari G.A.Y. 2016. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BANGLI. Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016*.
- Putra, T.O. 2016. *Formulasi Unit Cost Layanan Kesehatan Puskesmas Dalam Rangka Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan layanan Umum*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 3 (1), dalam Malika N. 2018. Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Artikel Penelitian*.
- Rahayu, S. E., Kesuma, A. I., dan Fakhroni, Z. 2013. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada RSUD A. W. Sjahrane di Samarinda). *Publikasi Ilmiah Vol. 1 No. 1*.
- Rahmawati, Fijri. "Sistem Informasi Mmanajemen RSUD Banyumas Masih Jadi PR". Radar Banyumas, 27 JUNI 2018. Diakses dari <https://radarbanyumas.co.id>

- Saleh, Z., dan Pendlebury, M. W. 2006. Accruals Accounting in Government-Developments in Malaysia. *Asia Pacific Business Review*, 12(4), 421-435.
- Sari M.P., Raharja. 2016. Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. *Artikel Penelitian*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta
- Sulanjari, Leny. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan Menurut Teori Kontinjensi Luder. *Jurnal Bisnis &Ekonomi*. 14 (2). Diakses dari <http://www.journal.ummg.ac.id>
- Surianto, Trisnantoro L. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Di Rsud Undata Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, VOLUME 02 No. 01 Maret z 2013 Halaman 35 – 41*.
- Trianasari, Ely, Muhammad Syafii Idrus. 2012. *Evaluasi Strategi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang Sebelum dan Sesudah Badan layanan Umum Daerah (BLUD)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 1 (2), dalam Malika N. 2018. Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Artikel Penelitian*.
- Trisnantoro L. 2005. *Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar*. Yogyakarta: ANDI, dalam Surianto, Trisnantoro L. 2013. Evaluasi Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Di Rsud Undata Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, VOLUME 02 No. 01 Maret z 2013 Halaman 35 – 41*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Upping, P., dan Oliver, J. 2011. Accounting Change Model for The Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 364-380.
- Waluyo, B. 2014. Analisis Permasalahan pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha Vol. 3/Tahun XII*: 27-38.
- Waweru, N. M., et al. 2004. Management Accounting Change in South Africa: Case Studies from Retail Services. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(5), 675-704.
- Wayan I., Suartana. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Widiastutik, Niken., R. AnastasiaEndang Susilawati, dan Abdul Halim. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 45 Dan PMK No. 76/PMK.05/2008 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Unit Bisnis Griya Brawijaya Universitas Brawijaya Berstatus Badan Layanan Umum. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4 (1). Diakses dari <http://www.neliti.com>
- Yamamoto, K. 1999. Accounting System Reform in Japanese Local Governments. *Financial Accountability & Management*, 15(3?4), 291-307.
- Yapa, P. W. Senarath and Sarath Ukwatte. 2015. The New Public Financial Management (NPFM) and Accrual Accounting in Sri Lanka. *In The Public Sector Accounting, Accountability and Auditing in Emerging Economies*, 15, 7-50, Doi:10.1108/S1479-356320150000015002.